DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman. (1978). *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Alumni.

Alting, Husen. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Chomzah, Ali Achmad. (2002). *Hukum Pertanahan*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Dianto Bachriadi dan Anton Lucas. (2001). *Merampas Tanah Rakyat : Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

Effendy Saman, Anthony LP Hutapea, dan Wailayatiningsih. (1993). *Politik Hukum Penguasaan Hutan di Indonesia*. Jakarta : WALHI.

ES Ardinarto. (2009). *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*. Surakarta : LPP dan UNS Press Universitas Sebelas Maret.

Hadikusuma, Hilman. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. (2010). *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.

H.A.M Effendy. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Semarang : Duta Grafika.

J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. (2003). Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.

Keraf, A.S. *Etika Lingkungan Hidup*. (2010). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mariane, Irene. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. (2014). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad, Bushar. (1981). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Muin, Idianto. (2013). *Kelompok Permintaan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.

Parlindungan, Adi Putra. (1993). *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria.* Bandung : CV Bandar Maju.

Rahardjo, Soetjipto. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni.

Salindeho, John. (1993). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Samosir, Djamanat. (2014). *Hukum Adat Indonesia : Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung : CV Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono. (1981). *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : CV Rajawali.

_____. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soepomo. (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramatiha.

Sudiyat, Iman. (2000). *Hukum Adat Sketsa Asas.* Yogyakarta: Liberty.

Sumardjono, Maria S.W. (1982). *Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria*. Yogyakarta : Andi Offset.

Ter.Haar. (1981). *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Wignjodipoero, Soerojo. (1988). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : CV Haji Masagung.

B. JURNAL

Adhuri, Dedi Supriadi. (2002). *Jurnal Antropologi Desa : Antara Desa dan Marga Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Muchsin. (2004). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Siscawati, Mia. (2014). *Jurnal Transformasi Sosial : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*. Yogyakarta : Insist Press.

Taqwaddin. (2010). *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum : Universitas Sumatera Utara.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nation Convention on Biological Diversity).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Pelaksanan Tugas Bidang Keagrarian Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum.

Keputusan Presiden RI No 48 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/1993 Tentang Ketentuan Hak Pemungutan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan Dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat, Dan Lembaga Adat Di Daerah.

D. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Simbur_Cahaya

http://politik.kompasiana.com/2011/07/02/kilas-balik-pemerintahan-marga-di-sumatera-selatan-377426.html

http://www.mongabay.co.id/2014/12/19/bksda-sumsel-kembali-robohkan-109-bangunan-masyarakat-adat-di-sm-dangku

http://adetaris.blogspot.co.id/2007/03/sistem-marga-di-sumatera-selatan.html